

Research Paper



Family Hope Program (PKH) in Providing Family Welfare in Selagalas Village, Indonesia.

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memberikan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Selagalas, Indonesia.

Annisa Prina Wulandari^{*1}, Ihsan Rois², Endang Astuti³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Mataram, Indonesia

Article Info

Submitted:

01/03/2023

Accepted:

02/04/2023

Approved:

02/04/2023

Published:

12/04/2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball dan purposive. Adapun informan dari penelitian ini terdiri dari 1 informan kunci, 3 informan utama, dan 6 informan tambahan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi (triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori). Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa pelaksanaan program PKH di Kelurahan Selagalas belum berjalan dengan optimal, hal ini dilihat dari tujuan utama program PKH dalam mengurangi angka kemiskinan, memutus rantai kemiskinan serta peningkatan kualitas SDM belum tercapai.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan (PKH), Kesejahteraan Keluarga.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Family Hope Program (PKH) in providing family welfare in Selagalas Village, Sandubaya District, Mataram City. The research approach used is a qualitative approach with data collection techniques, observation, interviews, and documentation. Maintenance of informants in this study used snowball and purposive techniques. The informants from this study consisted of 1 key informant, 3 main informants, and 6 additional informants. The technique of checking the validity of the data used by the authors in this study is to use triangulation techniques (source triangulation, method triangulation, and theoretical triangulation). Based on the results obtained from the research that the implementation of the PKH program in Selagalas Village has not run optimally, this can be seen from the main objectives of the PKH program in reducing poverty, breaking the poverty chain and improving the quality of human resources which have not been achieved.

Keywords: Program Keluarga Harapan (PKH), Family Welfare.

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) terfokus pada 3 komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan dari program ini adalah peningkatan kesadaran dari KPM akan pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan berdampak pada peningkatan

kualitas sosial yang dilakukan secara bersamaan dengan pelayanan pendidikan serta Kesehatan, (Fajriati & Isnaeni, 2020)

Hasni Hanif dalam (Andika, 2021) Program Keluarga Harapan (PKH) ini bertujuan meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin

* Correspondence Address

E-mail: annisaprina@gmail.com

dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, dan diharapkan untuk memberikan ruang lebih leluasa bagi peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga.

Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial dalam (Daud & Marini, 2018) Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk membantu penduduk miskin terbawah berupa bantuan bersyarat. Program ini diharapkan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan millennium (*Millennium Development Goals* atau MDGs), yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan kematian ibu melahirkan. Oleh Karena itu, pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi prioritas Pemerintah Indonesia dan sekaligus menjadi program andalan sebagai upaya pemerintah dalam mengentaskan rantai kemiskinan di Indonesia. Dalam hal ini, perlu adanya koordinasi dan sinergisitas dan dukungan lintas kementerian seperti: Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kesehatan. Sehingga upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tersebut dan segera diwujudkan (Liberti & Yuliani, 2022).

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Mataram masuknya Program Keluarga Harapan di Kota Mataram mulai Tahun 2012 dengan jumlah peserta yang saat itu dinamakan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebanyak 5.191 RTSM, jumlah peserta ini bersumber dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011. Dalam perjalanannya pada tahun 2019 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kota Mataram mendapatkan penambahan peserta sebanyak 17.449 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan jumlah besaran bantuan PKH yang dikeluarkan sebesar Rp9.789.050.000. Pada tahun 2020 per tahap empat Kota Mataram mendapatkan penambahan sebanyak 18.387 jumlah KPM hingga tahun 2021 per tahap tiga Kota Mataram kembali mendapatkan penambahan jumlah KPM sebanyak 20.124 KPM dengan

jumlah besaran bantuan PKH yang dikeluarkan meningkat sebesar Rp14.548.675.000 (Dinas Sosial Kota Mataram 2022), (JUMIANI, 2021)

Kecamatan Sandubaya beberapa kali mendapatkan penambahan jumlah KPM PKH sehingga di tahun 2020 total besaran bantuan yang diterima oleh peserta PKH di Kecamatan Sandubaya sebesar Rp2.927.850.000. Pada tahun 2021 Kecamatan Sandubaya mendapatkan penambahan jumlah KPM PKH dengan total besaran bantuan PKH yang diterima oleh peserta PKH di Kecamatan Sandubaya sebesar Rp3.080.725.000. Kelurahan Selagalas merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan mendapatkan penambahan jumlah KPM setiap tahunnya dengan jumlah penerima bantuan PKH terbanyak di Tahun 2021 dengan besaran bantuan PKH yang dikeluarkan sebesar Rp638.625.000 (Dinas Sosial Kota Mataram 2022).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Mataram tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 1,39 penduduk miskin dengan penambahan peserta PKH sebanyak 938 KPM PKH. Di tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kota Mataram mengalami peningkatan karena terdampak covid-19. Oleh Karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan tersebut, baik kepada keluarga yang terdaftar dalam data terpadu sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan keberhasilan program ini dilaksanakan di Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Dari permasalahan tersebut peneliti mengangkat judul penelitian terkait: "Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram", (Bangun, 2022)

METODE

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif

dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran secara detail tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Prosedur pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah (Sugiyono, 2008): Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memberikan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, (Jariah, 2021)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan wawancara sistematis, dimana peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis tentang apa yang akan ditanyakan kepada responden. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang terkait dengan fokus penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memberikan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, (Jariah, 2021)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, Teknik ini menggunakan tiga tahap (Sugiyono, 2008) yaitu: reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan serta verifikasi. Sugiyono dalam (Novitasari, 2019) Data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian diolah dalam bentuk laporan melalui proses pengklasifikasian berupa pengelompokan data agar dapat tersusun secara sistematis. Proses ini berlangsung selama penelitian dan bertujuan agar data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah serta mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti memfokuskan dan menyeleksi data yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.

Display atau penyajian data berfungsi untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu yang dapat mendukung proses penarikan kesimpulan agar data yang dikumpulkan dapat dipahami. Penyajian data dapat berupa grafik, bagan ataupun dalam bentuk naratif. Dalam penelitian Display atau Penyajian Data berupa hasil wawancara menggunakan tabel dengan teks dalam bentuk naratif Farida Nugrahani dalam (Novitasari, 2019) Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan kesimpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Sugiyono dalam (Novitasari, 2019) kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang diluncurkan oleh pemerintah dengan memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), (Suleman & Resnawaty, 2017) dalam bentuk uang tunai yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan memenuhi syarat tertentu. Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan, memutus rantai kemiskinan, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pada kelompok masyarakat kurang mampu. Program PKH merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan yang penerimanya diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, X1 selaku informan kunci mengatakan bahwa :

“ Program PKH (Program Keluarga Harapan) adalah program bantuan sosial bersyarat dari Kementrian Republik Indonesia yang diberikan kepada warga yang termasuk dalam data DTKS (Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan komponen Ibu Hamil, Balita, Anak Sekolah (SD,SMP,SMA), distabilitas berat, dan lansia"

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan tahun 2012 di Kota Mataram. Program PKH menyisir hampir sebagian besar daerah yang ada di Kota Mataram dengan pertimbangan pemerintah. Kementerian Sosial memberikan tugas kepada Dinas Sosial untuk menjalankan program PKH dalam membantu mengurangi angka kemiskinan baik di kabupaten atau kota sampai di pelosok desa. Untuk menjalankan program PKH, dinas sosial menggunakan pendamping sebagai pelaksana yang terjun langsung ke masyarakat. Program PKH memiliki tim koordinasi di setiap wilayah dan pendamping di setiap desa. Adapun, tahapan dalam pelaksanaan program PKH berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan PKH dari kementerian Sosial, 2021, (Muttakin et al., 2021)

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon KPM. Perencanaan yang dilakukan di Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya dalam menentukan calon KPM berdasarkan pada hasil rapat MUSKALING (Musyawarah Lingkungan) yang disetujui oleh Lurah.

Informan X1 mengatakan :

" Untuk calon KPM diusulkan oleh pihak desa melalui hasil rapat MUSKALING karena pihak desa sendiri yang mengetahui bagaimana keadaan dan kondisi warganya mba. Biasanya juga mereka ada yang ngaku kalau tidak punya tanah atau harta, padahal aslinya dia punya. Nanti, dari kelurahan memasukkan data calon penerima bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG. Dan untuk penentuannya KPM PKH berdasarkan keputusan Kementerian Sosial"

Penetapan calon KPM PKH berdasarkan data dari kelurahan yang dimasukkan dalam aplikasi SIKS-NG yang akan di verifikasi langsung dari Kementerian Sosial RI sebagai penerima KPM PKH. Namun dalam pelaksanaan penentuan calon KPM

PKH melalui MUSKALING seharusnya juga melibatkan pendamping PKH selaku pendamping penerima KPM PKH yang akan mendampingi dan mengetahui lebih jelas komponen dan kriteria penerima PKH. Namun dalam pelaksanaannya, pendamping PKH tidak dilibatkan dalam hal ini. Informan Y3:

"Kami tidak pernah dilibatkan dalam penentuan calon KPM PKH. Ada rapat MUSKALING untuk penentuan calon penerima PKH saja kami tidak diikutsertakan."

Dari wawancara ini kita bisa lihat bahwa perencanaan dalam melaksanakan program PKH di Kelurahan Selagalas belum sepenuhnya tercapai karena adanya pihak yang tidak terlibat dalam penentuan calon KPM PKH. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dari pihak kelurahan dan pendamping PKH kurang bekerja bersama dalam menjalankan program PKH ini.

2. Pertemuan Awal dan Validasi

Tahap pertemuan awal dan validasi dilakukan dengan pendamping sosial PKH melaksanakan sosialisasi pada Pertemuan Awal (PA) agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH.

Namun dalam pelaksanaannya, pertemuan awal di Kelurahan Selagalas tidak dilakukan oleh pendamping sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dikarenakan terkendala oleh kondisi adanya Covid-19. Informan Y3 mengatakan :

" Semenjak adanya Covid itu kami tidak melakukan pertemuan awal. Kalau ngga salah di tahun 2020 itu kami hanya menerima data penerima KPM PKH dari DTKS dan kami melakukan validasi data dari penerima KPM PKH"

Setelah sosialisasi, informan Y2 melakukan validasi data masyarakat yang dikirim dari pusat untuk dikonfirmasi sesuai dengan kondisi calon peserta PKH. Informan Y2 :

" Karena kami tidak melakukan sosialisasi jadi data yang dari DTKS yang sudah ada nama dan alamatnya itu langsung kita turun untuk cek keadaannya. Kegiatan validasi data yang dikirim ke pusat kami konfirmasi sekiranya benar tidak dia miskin,

kondisi rumahnya gimana, jumlah tanggungannya berapa, penghasilan dan pengeluarannya per bulan berapa. Karena biasanya disini rata-rata kerja buruh kadang kita tanya nya per hari untuk penghasilannya biar dianya ngga bingung. Habis itu, datanya kami kirim lagi ke pusat untuk nentuin mana yang berhak dapat bantuan dan yang tidak dapat."

Pada saat validasi data ditemukan adanya ketidakcocokan pengisian data yang dilakukan oleh calon KPM PKH dengan kondisi yang sebenarnya. Seperti yang disampaikan Informan Y2 :

" saat validasi data juga kami menemukan adanya ketidaksesuaian data dengan yang dilapangan. Nah, dari kami sudah mencoret daftar peserta ini tapi kadang walaupun kami coret datanya bisa keluar dari DTKS sebagai penerima PKH"

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa pelaksanaan pertemuan awal dan validasi tidak berjalan dengan baik. Pertemuan awal yang tidak dilaksanakan sehingga KPM PKH tidak mengerti tentang program PKH serta pemanfaatannya dan kurangnya kerja sama antara pihak kelurahan dan pendamping PKH saat melakukan validasi data.

3. Penetapan KPM PKH

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menetapkan data KPM PKH berdasarkan hasil pemutakhiran data dan data hasil validasi calon KPM PKH sesuai peserta PKH. Data yang status rekeningnya aktif selanjutnya ditetapkan menjadi KPM PKH. Seperti yang dikatakan informan Y3 :

"setelah kita validasi data dan dikirim kembali ke pusat untuk diverifikasi oleh kemensos RI sebagai penerima PKH. Setelah itu, kita menunggu Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Nah, data yang sudah keluar dari DTKS itu ditetapkan sebagai penerima PKH"

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa penentuan KPM PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

4. Penyaluran Bantuan Sosial

Bentuk bantuan sosial PKH diberikan dalam bentuk uang tunai kepada penerima

KPM PKH. Penyaluran bantuan sosial PKH untuk penerima manfaat PKH dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran berjalan berdasarkan skema penyaluran bantuan sosial sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial. Seperti yang dikatakan informan Y2 :

"pembagiannya bertahap dilakukan dalam setahun. Dibagi dalam per triwulan di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Misalnya kaya gini, dia dapat komponen anak sekolah yang SD jumlah yang di dapat dalam bentuk uang tunai 900.000. Nah, kalo dibagi ke dalam triwulan dia dapatnya per triwulan itu 225.000"

Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan secara non tunai. Bantuan sosial PKH dicairkan melalui buku tabungan khusus yang diberikan kepada KPM PKH. Seperti yang dikatakan informan Y3:

" pencairan bantuan sosial melalui buku tabungan pribadi KPM PKH. Jadi, saya selalu bilang ke mereka untuk buku tabungannya jangan dipegang sama siapa-siapa selain mereka yang menjadi KPM PKH. Buku tabungan itu tidak boleh dipindah tangankan ke pihak lain atau orang lain"

Setelah pencairan dana bantuan sosial PKH dilakukan oleh KPM PKH. Selanjutnya, dilaksanakan rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH. Rekonsiliasi dilakukan untuk pengecekan administrasi, data dan dana hasil penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara berjenjang antara pelaksana PKH dengan bank penyalur. Kegiatan rekonsiliasi bertujuan untuk mengecek bantuan sosial PKH sudah diterima atau sebaliknya belum menerima bantuan PKH oleh KPM PKH. Seperti yang dikatakan informan Y3:

"Rekonsiliasi kami lakukan untuk mengecek apakah penerima KPM PKH sudah menerima atau belum bantuan yang di dapat. Kalau misalnya nanti dia belum menerima bantuan maka akan kami cek kembali penyebab mereka tidak dapat melakukan pencairan dana bantuannya"

Selain itu, kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bantuan sosial adalah proses yang dilakukan oleh Kementrian Sosial, pelaksana PKH di daerah untuk memastikan bahwa bantuan telah diterima

oleh KPM PKH. Informan Y1 selaku informan utama mengatakan bahwa:

"kegiatan pelaksanaan program PKH yang bertanggung jawab penuh adalah Kementerian Sosial RI. Kami dari kelurahan hanya monitoring dalam pelaksanaan program ini dibantu oleh pendamping PKH yang telah ditugaskan di kelurahan ini dari kemensos untuk membantu jalannya program ini agar berjalan sesuai ketentuan"

Dari hasil wawancara penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Selagalas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyaluran bantuan sosial melalui bank penyalur dimana KPM PKH diberikan tabungan pribadi sebagai PKM PKH. Dan bantuan yang diterima akan disalurkan melalui rekening pribadi PKM PKH.

5. Verifikasi Komitmen

Program PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang mensyaratkan pemenuhan kewajiban terkait pemanfaatan layanan kesehatan serta layanan pendidikan oleh KPM PKH. Verifikasi komitmen bertujuan untuk memastikan seluruh anggota KPM PKH terdaftar, hadir, dan mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan secara rutin sesuai dengan protokol kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Pendamping PKH memverifikasi KPM di Kelurahan Selagalas dengan cara melihat absensi raport anak KPM yang dikumpulkan persemester pada ketua kelompok. Untuk melihat keaktifan KPM dalam pemeriksaan kesehatan dilihat dari data posyandu perbulan pendamping PKH. Informan Y3 mengatakan:

" verifikasi komitmen yang dilakukan biasanya si untuk komponen pendidikan saya minta raport nya per semester nanti biasanya di kumpulkan di masing-masing ketua kelompok. Biasanya kalo disini dikumpulin di ibu hilmy ini mba. Kalau yang posyandu nya saya berkoordinasi langsung dengan ibu kader posyandu, jadi dari mereka kita tau data lengkap pemeriksaan ibu hamil, penimbangan balita di posyandu. Kegiatan ini biasanya saya lakukan sebulan sekali, dan datanya dikumpulkan setiap kita pertemuan"

Dari hasil observasi disimpulkan bahwa KPM rata-rata aktif dalam kegiatan posyandu, bukan hanya masyarakat penerima PKH tapi seluruh masyarakat yang memiliki balita, ibu hamil serta lansia ikut serta dalam kegiatan posyandu yang diadakan di setiap lingkungan di Kelurahan Selagalas

Program Keluarga Harapan Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai penanganan untuk mengatasi kemiskinan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, (Saragi et al., 2021). Pemerintah selalu berupaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada dengan meluncurkan program bantuan sosial untuk masyarakat miskin atau kurang mampu. PKH adalah salah satu program bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan oleh pemerintah tahun 2007 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan serta kesehatan.

Keberhasilan suatu program diukur dari tersampaikan atau tidaknya tujuan dari program tersebut. Adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan KPM. Informan X1 dalam wawancara :

"pelaksanaan program PKH yang baik yaitu apabila program ini mampu memberikan hak yang diterima oleh masyarakat yang diharapkan mampu mencapai tujuannya untuk memberikan kesejahteraan terhadap penerima nya serta program ini bisa tepat sasaran sehingga diperlukan pihak-pihak yang berkaitan dengan program ini berkoordinasi dengan baik agar program PKH ini bisa berjalan dengan lancar"

Program PKH dalam mensejahterakan masyarakat yaiu dengan cara pemberian bantuan dalam bentuk uang tunai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dari keluarga KPM. Dana bantuan tersebut diberikan sebagai timbal balik dari KPM dalam memenuhi kewajiban. Informan X1 :

“program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengurangi kemiskinan maka proram ini memberikan dana bantuan berupa uang tunai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penerima sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi penerima PKH tersebut”

Selain itu, pendamping juga mengatakan hal yang sama, seperti informan Y3 dalam wawancara :

“KPM PKH diberikan dana bantuan berupa uang tunai yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya seperti memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga KPM bisa hidup sejahtera. Selain itu, KPM PKH juga diharuskan untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, karena kesehatan dan pendidikan juga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan”

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) seseorang dikatakan sejahtera dilihat dari tiga indikator yang terdiri dari pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

1. Pendapatan

Tabel 1 Tingkat Pendapatan Per-Bulan KPM PKH di Kelurahan Selagalas

No	Informan	Tingkat Pendapatan Per Bulan			
		Sangat Tinggi (>Rp3.500.000)	Tinggi (Rp2.500.000- Rp 3.000.000)	Sedang (Rp1.500.000- Rp2.500.000)	Rendah (<Rp1.500.000)
1	Informan Z1	-	-	-	Rp 500.000
2	Informan Z2	-	-	-	Rp1.000.000
3	Informan Z3	-	-	Rp1.560.000	-
4	Informan Z4	-	-	-	Rp 650.000
5	Informan Z5	-	-	-	Rp 800.000
6	Informan Z6	-	-	Rp 2.000.000	-

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan KPM PKH adalah berada di tingkat rendah yaitu berpenghasilan kurang dari Rp 1.500.000 dalam sebulan. Dari hasil wawancara dengan peserta PKH bahwa dari 6 KPM hanya ada satu orang yang memiliki usaha yaitu Z1 yang berjualan makanan ringan seperti jajan ciki. Seperti yang dikatakan informan Z1 dalam wawancara:

Program PKH ini mengarahkan KPM untuk menjadi keluarga yang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain menerima bantuan berupa uang tunai, KPM PKH juga diberikan pendampingan yang tujuannya untuk mengarahkan KPM kearah peningkatan kesejahteraan keluarga dimana pendamping mengajarkan KPM tentang peluang usaha yang bisa dijalankan untuk menambah pendapatan keluarga KPM. Informan Y3 mengatakan:

“setiap pertemuan rutin yang saya jelaskan terkait pentingnya pendidikan, bagaimana menjadi ibu yang baik dalam mengurus anak, dan seperti ini juga kami bimbing agar penerima KPM bisa menjadi mandiri kedepannya dengan mengajarkan peluang bisnis”

Menurut observasi yang telah peneliti amati bahwa program ini masih tidak mampu meningkatkan pendapatan keluarga KPM. Program PKH ini tidak memberikan dampak dalam hal peningkatan pendapatan KPM. Dilihat pada tabel dibawah ini terkait dengan tingkat pendapatan KPM berdasarkan informan yang di wawancarai oleh peneliti.

“lumayan dari jualan ini saya bisa setidaknya untuk kasi uang jajan ke anak saya, 1000 atau 2000.

Hal ini terjadi karena KPM tidak pernah menganggap pertemuan rutin itu sebagai sesuatu yang berguna dan bermanfaat kedepannya, mereka hadir untuk memenuhi absensi kehadiran KPM tanpa memperhatikan arahan yang dijelaskan oleh pendamping. Seperti yang dikatakan oleh informan Y2 selaku pendamping.

"kalau setiap pertemuan rutin saya jarang menyampaikan banyak-banyak. Karena biasa kan namanya ibu-ibu kadang yang disampaikan sekarang terus besok ditanya lagi mereka jadi lupa"

2. Kesehatan

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian, kondisi kesehatan KPM PKH dalam kondisi yang sehat. KPM PKH sangat memperhatikan kesehatan keluarganya, jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit KPM akan segera berobat ke PUSKESMAS atau ke klinik kesehatan. Seluruh KPM PKH sudah terjamin biaya kesehatan karena setiap anggota memiliki BPJS kesehatan / Jamsostek. Ada beberapa informan yang menggunakan BPJS untuk pergi berobat karena tidak mempunyai biaya yang cukup untuk berobat ke klinik atau rumah sakit yang tidak memakai BPJS. Seperti informan Z2 mengatakan:

"puskesmas atau rumah sakit yang ada BPJS. Alhamdulillah, keluarga saya jarang sakit dan kalau sakit biasanya yang sakit biasa itu. Jadi, untuk berobat ke puskesmas atau rumah sakit biar kartu BPJS ini digunakan walaupun prosedurnya agak susah tapi gapapa. Namanya juga gratis"

Hal ini juga diungkapkan oleh informan Z3 yang lebih memilih untuk berobat di rumah sakit yang bisa menggunakan BPJS karena tidak mampu untuk biaya berobat. Informan Z3 dalam wawancara:

"kerumah sakit yang ada BPJS nya atau ke puskesmas karena untuk makan aja kita susah apalagi untuk berobat. Mau gimanapun prosedurnya tetap kita jalanin karena kita kan ngga punya uang yang berlebih"

Jadi program PKH ini walaupun sudah menjamin biaya kesehatan dan keluarga KPM, namun hal tersebut tidak didukung dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi KPM untuk menggunakan BPJS atau kartu PKH. KPM tidak langsung ditangani oleh rumah sakit terkait, melainkan KPM diminta untuk mengisi berbagai macam prosedur baru bisa ditangani. KPM dengan terpaksa tetap

memilih rumah sakit yang bisa menggunakan BPJS untuk berobat dikarenakan terkendala oleh biaya walaupun harus memenuhi prosedur yang cukup rumit.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, pendidikan merupakan salah satu bidang kewajiban yang harus dipenuhi oleh KPM PKH sebagai timbal balik yang dilakukan terhadap pemerintah yang memberikan danabantuan berupa uang tunai. Pemberian beban ini mengarahkan KPM untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang yang tinggi sehingga untuk jangka panjang mampu melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing dimasa yang akan data.

Dari hasil wawancara kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan tergolong mudah. Seperti yang dikatakan Informan Z3:

"dekat sekolah di SD 43. Biasa juga dia jalan kaki ke sekolah. Anak saya juga kebetulan masih SD jadi biaya sekolah kaya SPP itu ngga ada palingan sy bayar buku LKS atau keperluan sekolahnya"

Informan Z6 juga merasa saat proses penerimaan anaknya masuk sekolah tidak dipersulit. Hanya diperlukan umur yang cukup dan sudah bisa baca serta melengkapi berkas persyaratan yang diperlukan. Informan Z6:

"masuk SD sekarang umurnya harus pas mba. Waktu itu anak saya juga ditanya sudah bisa membaca atau belum. Dan ada beberapa berkas persyaratan yang saya lengkapi juga untuk pendaftaran"

Dalam pelaksanaannya Program Keluarga Harapan (PKH) dirasa masih belum mampu memudahkan penerima KPM PKH dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya. Seperti yang dikatakan Informan Z4:

"Iya, sangat membantu sekali. Terutama untuk bayar SPP nya. Walaupun untuk kebutuhan sekolahnya belum terpenuhi sepenuhnya hanya cukup untuk bayar SPP"

Hal ini juga dirasa sama dengan Informan Z2 yang memiliki anak yang bersekolah SD dan SMA yang dirasa belum mampu memenuhi semua kebutuhan pendidikannya. Informan Z2 mengatakan:

"Tapi, ngga sepenuhnya terpenuhi mba, soalnya kan yang SMA ada bayar SPP nya jadi saya bagi-bagi dah sama-sama. Kalau kurang ya cari sampingan"

Kesimpulan dari wawancara dengan KPM PKH yang ada di Kelurahan Selagalas kemudahan dalam memasukkan anak ke jenjang pendidikan tergolong mudah. Akan tetapi, untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya dirasa masih belum bisa memenuhi kebutuhan pendidikannya. Dan program PKH ini dirasa belum mampu untuk memberikan kesejahteraan terhadap KPM PKH dalam akses layanan pendidikan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan terkait dengan pembahasan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Kesejahteraan Di Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram bahwa. Dari 3 Informan utama, 1 informan utama mengatakan program PKH dijalankan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada sementara 2 informan utama yaitu pendamping PKH dalam penelitian ini bisa dijelaskan bahwa pelaksanaan program PKH di Kelurahan Selagalas belum berjalan dengan optimal, hal ini dilihat dari tujuan program PKH dalam mengurangi angka kemiskinan, memutus rantai kemiskinan serta peningkatan kualitas SDM belum tercapai karena dalam mekanisme pelaksanaan program PKH yang masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan yang tidak melibatkan pihak pendamping dalam menentukan calon KPM PKH. Tahap pertemuan awal yang dilakukan dengan pemberian sosialisasi tidak dilakukan sehingga KPM PKH tidak mengerti bagaimana pemanfaatan bantuan PKH serta validasi data yang dilakukukan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari 1 informan utama mengatakan Program Keluarga Harapan dirasa mampu memberikan kesejahteraan bagi

penerimanya sementara 1 informan kunci dan 2 informan utama serta 6 informan tambahan selaku penerima bantuan PKH dilihat bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dikatakan masih belum mampu mensejahterakan masyarakat. Hal ini dilihat dari pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Dari pendapatan yang dirasa belum mampu meningkatkan pendapatan keluarga KPM, terlihat dari tingkat pendapatan KPM PKH yang berada di tingkat rendah karena tidak memanfaatkan peluang bisnis yang diajarkan oleh pendamping PKH.

Selain itu, dalam kesehatan anggota KPM PKH sangat memperhatikan kesehatan keluarganya, namun dalam pelaksanaannya jika menggunakan BPJS prosedur yang harus dipenuhi terbilang cukup rumit. Akan tetapi, KPM PKH tetap memilih menggunakan BPJS untuk berobat dikarenakan terkendala oleh biaya. Dan yang terakhir pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat kurang mampu, hal ini terlihat KPM PKH memiliki kemudahan untuk memasukkan anaknya ke jenjang pendidikan. Akan tetapi, untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya dirasa masih belum bisa memenuhi kebutuhan pendidikannya. Dan program PKH ini dirasa belum mampu untuk memberikan kesejahteraan terhadap KPM PKH dalam akses layanan pendidikan.

Deklarasi penulis

Kontribusi dan tanggung jawab penulis

Para penulis membuat kontribusi besar untuk konsepsi dan desain penelitian. Para penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan pembahasan hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Ketersediaan data dan bahan

Semua data tersedia dari penulis.

Kepentingan yang bersaing

Para penulis menyatakan tidak ada kepentingan bersaing.

REFERENSI

- Andika, S. (2021). Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu). *Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 2 No.(1), 44–55.
- Bangun, N. O. (2022). *Implementasi Program Bansos dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sentul Kabupaten Tangerang*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Daud, M., & Marini, Y. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 2(1), 29–38. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v2i1.51>
- Fajriati, N. I., & Isnaeni, N. (2020). Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Kecamatan Tungkal Ilir). *Journal of Islamic Economic and Finance NAJAH IQTISHOD*, 1(1), 43–50.
- Jariah, A. (2021). *Efektivitas penerapan aplikasi gugatan mandiri bagi masyarakat pencari keadilan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Mataram*. UIN Mataram.
- JUMIANI, J. (2021). *PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SOSIAL MASYARAKAT DESA POMPENGAN KECAMATAN LAMASI TIMUR KABUPATEN LUWU*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.
- Liberti, & Yuliani, F. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat. *Jurnal Niara*, 14(3), 224–232. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.7379>
- Muttakin, F., Fatwa, K. N., & Sarbaini, S. (2021). Implementasi Additive Ratio Assessment Model untuk Rekomendasi Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. *SITEKIN: Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri*, 19(1), 40–48.
- Novitasari, D. (2019). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. *Metode Penelitian*, 9, 22–34.
- Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 1–10.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (cetakan ke). CV Alfabeta.
- Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 88–92.